

## AGAMA DAN DEMOKRASI

Yohanes Gualberthus Embu Geju (21757203)

Agama dan demokrasi merupakan salah satu permasalahan yang seringkali dibicarakan oleh para pakar dalam berbagai tingkat disiplin ilmu. Pemahaman akan agama dan demokrasi merujuk pada suatu perbedaan yang sangat mencolok antar keduanya. Agama lebih mengarah kepada sistem kepercayaan yang dianut oleh seorang atau sekelompok orang, sedangkan demokrasi merujuk pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu bangsa atau negara. Eksistensi agama dan demokrasi sebagai instrumen penting dalam kehidupan manusia, memantik begitu banyak pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam diskursus seputar agama dan teori politik selalu muncul tesis yang menegaskan bahwa keyakinan-keyakinan religius merupakan persoalan privat dan karena itu harus disingkirkan dari proses deliberasi politik.<sup>1</sup> Namun, realitas agama yang menjadi alat, media bahkan batu loncatan untuk tujuan perpolitikan saat ini semakin tidak dapat dipungkiri. Agama dilihat dan dimaknai sebagai lahan subur dari sekelompok orang atau instansi tertentu untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi dan golongan hingga untuk menyerang dan memusnahkan lawan atau musuh. Sebut saja kasus Ahok beberapa tahun lalu yang oleh banyak pakar dilihat sebagai kasus penistaan agama atas dasar tujuan politik. Hal ini menunjukkan dalam situasi dan kondisi tertentu agama tidak lagi dilihat sebagai suatu yang bersifat pribadi/privasi melainkan sebagai sarana sosial untuk kepentingan privat. Jika demikian, bagaimana kita memahami idealnya suatu agama dan demokrasi yang sesungguhnya? Apakah agama dan demokrasi selalu dan senantiasa tentang perbedaan yang berdampak positif dan negatif? Dalam konteks ini, Avent Saur dalam tulisannya “Agama mau ke mana? Sebuah gugatan” akar permasalahannya bukanlah karakter kekuasaan melainkan penguasa yang tentu dihubungkan dengan agama. Di sini agama dalam dirinya sendiri, agama sebagai agama tidak digugat. Yang dihubungkan dengan akar itu adalah bahwa agama dipakai oleh siapa dan untuk apa? Agama seakan-akan diperalat dan memang demikianlah yang terjadi. Agama hanya mungkin dipedulikan sejauh memiliki keuntungan sosial dan politik.<sup>2</sup> Secara eksplisit, banyaknya kekerasan mengatasnamakan agama ini melukiskan wajah agama - agama yang bipolar dalam konsrelasi politik Indonesia. Di satu pihak, agama telah dan sedang menjadi "basis legitimasi" kekerasan horizontal antarwarga yang tampak lewat perseteruan fisik- nonfisik yang masif. Tidak hanya

---

<sup>1</sup> Otto Gusti Madung, 'AGAMA DAN DEMOKRASI Pandangan Jürgen Habermas Ttg Agama Dan Ruang Publik', 1999.

<sup>2</sup> Avent Saur, “Agama Mau Ke Mana? Sebuah Gugatan”, *Madjalah Vox Agama Mau Ke Mana?*, ( 55/01/2011).

sampai disitu, agama pun 'turut berandil' dalam menciptakan kekerasan struktural dengan mempengaruhi pemerintah untuk menciptakan produk hukum dan aneka peraturan yang diskriminatif. Politisasi agama telah melahirkan kekerasan agama yang mampu menghambat pembangunan nasional. Solidaritas yang berasal dari agama sebagai basis pra - politis kian dipertanyakan.<sup>3</sup>

### **Realitas agama dan demokrasi Indonesia**

Realitas agama dan demokrasi Indonesia sesungguhnya bukan suatu hal yang baru. Agama dan demokrasi menjadi barang yang paling laku dari masa lalu sampai sekarang ini, dan menjadi kebutuhan individu, masyarakat dan/bahkan negara dalam merealisasikan cita-cita. Agama dan demokrasi kadangkala justru berseberangan ketika memasuki sebuah sistem politik dan ruang publik. Agama tentu saja bagian dari kebudayaan (demokrasi) dalam perspektif antropologi.<sup>4</sup> Dalam sejarah politik Indonesia, kenyataan penggunaan agama sebagai instrumen untuk tujuan-tujuan tertentu sering terjadi. Pada zaman Orde Baru, agama sangat dibatasi ruang geraknya agar tidak menjadi identitas politik atau tujuan politik. Agama dianggap oleh penguasa sebagai ancaman politik yang harus dilunakkan, dan kalau perlu dipinggirkan. Elite politik ataupun massa yang menggunakan simbol agama untuk melawan hegemoni negara selalu dituding sebagai 'ekstrim kanan', seperti halnya penggunaan ideologi komunis dan atau sosialis untuk tujuan yang sama (mem-*pressure* hegemoni penguasa) dituding sebagai 'ekstrim kiri'. Akibatnya yang muncul adalah para elite politik yang telah mengalami alienasi politik sedemikian rupa. Sedangkan pada zaman reformasi atau pasca Orde Baru ini, agama mendapatkan ruang yang sangat lebar dan luas, nyaris tanpa kendala, untuk diaktualisasikan termasuk peran agama untuk dijadikan simbol dan motivator bagi gerakan politik.<sup>5</sup> Dua sisi zaman yang berbeda tetapi masih menyebabkan berbagai persoalan dengan hal yang sama.

Dalam hubungannya dengan demokrasi Indonesia bersumber pada kenyataan politik, tak dapat disangsikan lagi istilah demokrasi dalam kamus perpolitikan Indonesia hanyalah sebuah bualan dan eufemisme politik semata.<sup>6</sup> Hal ini nampak dalam sistem kepemimpinan

---

<sup>3</sup> Redem Kono, "Kiprah Politis Agama di Indonesia: Kebeluman Transposisi Nilai atau Euforia Infallibilitas Agama?, *Madjalah Vox Agama Mau Ke Mana?*, ( 55/01/2011), hlm. 15.

<sup>4</sup> Nur Khasanah and Achmad Irwan Hamzani, 'Relasi Agama Dan Demokrasi; Telaah Kritis Eksistensi Partai Islam Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6.4 (2019), 391–404 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13745>>.

<sup>5</sup> Siti Jahroh, 'POLITIK KEAGAMAAN DI INDONESIA (Studi Kedudukan Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia)', *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2011), 218–39.

<sup>6</sup> Redem Kono, *op.cit.*, hlm.43.

Presiden RI seperti Soekarno yang dengan demokrasi terpimpinnya terlalu meradikalkan pembangunan, Soeharto yang melalui demokrasi pancasila mengindoktrinasi warga negara dalam politik *floating mass*, Habibie yang dalam masa peralihan politik mengalami kebingungan politik, Megawati yang oleh kelembutan dalam menghadapi berbagai permasalahan seperti fundamentalis agama atau gerakan sektarian di Aceh dan Maluku telah menghambat demokratisasi politik negara Republik Indonesia, hingga SBY yang menekan bahkan menyepelkan demokrasi yang sehat dalam menegakkan keadilan. Hemat saya, kenyataan-kenyataan ini menunjukkan pelaksanaan akan arti dan makna demokrasi sesungguhnya kurang terealisasi dengan begitu baik. Kecenderungan mengutamakan hasil dan menyepelkan idealnya suatu proses atau prosedur demokrasi berdampak pada hilangnya harkat dan martabat warga sebagai manusia. Bisa dikatakan penghalalan segala cara atau sistem asal bapak senang menjadi senjata ampuh untuk merealisasikan kebijakan.

### **Pandangan Juergen Habermas tentang Agama, Demokrasi dan Ruang Publik**

Habermas (dalam Budi Hardiman, 2009:151) mengatakan ruang publik adalah semua wilayah kehidupan yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik. Wilayah ini menurutnya harus bebas dari dominasi dan sensor. Semua warga pada dasarnya dapat memasuki ruang yang demikian karena setiap individu pada dasarnya adalah warga privat yang karena sifat percakapannya menyangkut kepentingan umum, maka mereka memasuki wilayah publik. Situasi demikian mensyaratkan jaminan untuk berkumpul secara bebas dan menyatakan pendapatnya secara bebas pula.<sup>7</sup> Dalam konteks ini, Habermas mau menegaskan bahwa ruang publik merupakan akses yang diperuntukkan bagi semua orang tanpa terkecuali. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau pikiran sehingga terjadi apa yang dikatakan Habermas ruang publik sebagai jejaring mengkomunikasikan berbagai tema dan sikap-sikap. Dalam konteks ini, perwujudan demokrasi mungkin bisa terjadi. Namun, berhadapan dengan kehidupan keagamaan yang majemuk, pemahaman akan ruang publik sedikit dipertentangkan. Banyak orang berpandangan bahwa urusan keagamaan sebagai suatu yang bersifat privat, sehingga keterlibatan atau keaktifan seseorang atau sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama dalam urusan demokrasi (politik) hanya dapat menghilangkan citra dan merusak kereligiusan suatu agama. Hal ini juga menunjukkan kiprah agama telah terpasung karena posisi dilematis antara transposisi nilai yang belum tuntas dan maraknya kekerasan berbau agama.<sup>8</sup> Hemat saya, hal semacam ini menjadi salah satu indikator bagi setiap agama

---

<sup>7</sup> Ibrahim, '( Catatan Penting Untuk Pluralisme Agama Di Indonesia )', II.3 (2010), 1–10.

<sup>8</sup> Redem Kono, *op.cit.*, hlm. 46.

khususnya di Indonesia untuk merefleksikan sampai pada posisi dan kondisi politik apakah agama-agama boleh terlibat atau berperan aktif.

Habermas melalui konsep demokrasi deliberatif menganjurkan sebuah rekonstruksi sosiologis tentang demokrasi yang bertujuan untuk menjelaskan dan menyelidiki dinamika politik yang ada dalam sebuah negara.<sup>9</sup> Hal ini memberikan kesempatan luas dan bebas kepada warga negara untuk berpartisipasi secara politis dalam ruang diskursus tanpa represi.<sup>10</sup> Poin penting konsep demokrasi deliberatif Habermas yaitu pentingnya komunikasi dalam suatu ruang publik yang memungkinkan terjadinya dialog yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat adalah asosiasi otonom yang harus dilepaskan dari dominasi dan instrumentalisasi rezim kekuasaan administratif negara.<sup>11</sup> Dengan demikian, demokrasi ini mengupayakan pengakuan opini publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat secara luas yang diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam hubungannya dengan kehidupan agama melalui *opus magnumnya*, mulanya Habermas menyetujui pemisahan antara agama dan politik pengaruh perilaku berbagai aktor dari instrumen pemerintah sehingga Habermas memproklamasikan kematian agama. Agama seperti dijadikan ladang subur untuk tujuan politik tertentu sehingga nilai kereligiusan suatu agama tak lagi sakral. Namun, kebangkitan kaum fundamentalisme keagamaan semacam memberi angin segar. Melalui konsep masyarakat post-sekular, Habermas mengungkapkan peran penting agama dalam sebuah tatanan negara modern. Agama dipandang sebagai partner yang paling cocok dalam usaha mengatasi paham modernitas sekuler yang pincang, seperti tampak dalam dominasi model-model rasionalitas yang ekonomis, teknologis, dan naturalistik.<sup>12</sup> Melalui agama-agama, kemungkinan untuk membangun dialog diberdayakan dengan mengedepankan nilai kerjasama, saling menghargai, dan lain sebagainya di tengah tuntutan masyarakat yang plural. Oleh karena itu, konsep pemikiran Habermas diharapkan mampu mengidealkan kehidupan agama dan demokrasi dalam suatu negara khususnya kehidupan politik-agama di Indonesia yang masih belum konsisten.

---

<sup>9</sup> Juergen Habermas, *Between Facts and Norms*, (Cambridge: Polity Press, 1996), hlm. 287-289.a

<sup>10</sup> Redem Kono, "Kiprah Politis Agama di Indonesia: Kebeluman Transposisi Nilai atau Euforia Infalibilitas, Hlm. 37.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>12</sup> Otto Gusti Madung, 'AGAMA DAN DEMOKRASI Pandangan Jürgen Habermas Ttg Agama Dan Ruang Publik', 1999.







